

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU  
DALAM PELEPASAN HAK PENGUASAAN DENGAN  
GANTI RUGI DALAM JUAL BELI TANAH  
(Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)**

**ABSTRAK**

**Jonizar\***

**Dr. Mukidi, SE., SH., M.H**

**Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum**

Pemalsuan Sertipikat hak milik tanah seringkali menjadi masalah hukum bagi pihak-pihak atau oknum dari suatu lembaga yang tidak bertanggungjawab. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah, bagaimana pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah berdasarkan putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Kata Kunci: Surat Palsu, Jual Beli, Tanah.**

---

\*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION USING FORGED  
LETTER IN RELEASE OF OWNERSHIP RIGHTS WITH  
COMPENSATION IN THE SALE OF LAND  
(Study of Decision Number 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)**

**ABSTRACT**

**Jonizar\***

**Dr. Mukidi, SE., SH., M.H**

**Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum**

*Falsification of land ownership certificates often becomes a legal problem for irresponsible parties or persons from an institution. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the criminal act of using fake letters in the release of tenure rights with compensation in buying and selling land, how is the criminal responsibility of using fake letters in relinquishing tenure rights with compensation in buying and selling land, what are the legal considerations of judges in criminal acts used a forged letter in releasing tenure rights with compensation in the sale and purchase of land based on decision Number 1722/Pid.B/2021/PN Lbp.*

*The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The provisions for the crime of counterfeiting that apply in Indonesia are regulated in Article 263 paragraph (2) Jo article 55 of the Criminal Code and are punishable by imprisonment for a maximum of six years. The criminal responsibility for using a forged letter in releasing the right of ownership with compensation in the sale and purchase of land is that the defendant is sentenced to imprisonment for 3 (three) years.*

*The results of the study show that the judge's consideration in passing a decision on the case of using a forged letter in relinquishing tenure rights with compensation in buying and selling land is that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime using a forged letter in relinquishing tenure rights with compensation in buying and selling land and the Panel of Judges did not find things that could abolish criminal responsibility, either as reasons for justification or excuses, the Defendant must be held accountable for his actions.*

**Keywords: Fake Letters, Sale and Purchase, Land.**

*\* Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra.*